

KONSEP ETIKA BISNIS DAN HUBUNGANNYA DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Ryo Kusanagi¹, Meila Oktavia², Caren Yurenci³, Wilbert IE⁴, Susan Grace V Nainggolan⁵

ryokusanagi06@gmail.com¹, meilavia17@gmail.com², cyurenci@gmail.com³,
wilbertie5@gmail.com⁴, susan@eka-prasetya.ac.id⁵

STIE Eka Prasetya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep dasar etika bisnis dan Good Corporate Governance (GCG), menganalisis hubungan keterkaitan antara etika bisnis dan Good Corporate Governance (GCG), serta memberikan saran dan rekomendasi praktis berdasarkan praktik nyata di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kasus. Penelitian ini dianalisis dengan membandingkan isi dokumen serta hitungan sederhana dengan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Good Corporate Governance (GCG) meningkat setelah ditingkatkan kode etik dan sistem pelaporan internal.

Kata Kunci: Etika Bisnis, Good Corporate Governance (GCG), Tata Kelola Perusahaan, BUMN.

ABSTRACT

This research aims to explain the basic concepts of business ethics and Good Corporate Governance (GCG), analyze the relationship between business ethics and Good Corporate Governance (GCG), and provide practical suggestions and recommendations based on real practice in the field. This research uses qualitative research methods through case studies. This research was analyzed by comparing the contents of documents and simple calculations using SPSS. The research results show that the value of Good Corporate Governance (GCG) increases after improving the code of ethics and internal reporting system.

Keywords: Business Ethics, Good Corporate Governance (GCG), Corporate Governance, SOE.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di Indonesia menunjukkan kemajuan yang aktif dan sejalan dengan peningkatan investasi, pengadopsian teknologi internal, serta pengembangan infrastruktur nasional. Saat ini, bisnis berperan sebagai salah satu elemen kunci dalam kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya suatu negara, namun juga dapat menimbulkan konsekuensi yang cukup signifikan dan tantangan baru bagi perusahaan untuk lebih cermat dalam menjalankan operasinya. Salah satu sektor bisnis yang memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada masa ini, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sekitar 5% per tahun (BPS 2023). Pertumbuhan ini sebagian besar didukung oleh perusahaan di sektor konstruksi dan manufaktur, yang terlibat dalam banyak proyek strategis, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan permintaan industri (Humas, 2024). Dalam konteks ini, perusahaan – perusahaan BUMN memainkan peran utama dalam pelaksanaan proyek – proyek nasional seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bendungan, dan layanan publik lainnya. Namun, perkembangan ekonomi dan bisnis ini tidak selalu diiringi dengan praktik etika, moralitas, dan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini terbukti dari banyaknya tindakan penyelewengan yang merugikan pihak lain seperti tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang menyebabkan kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah setiap tahunnya.

Berbagai skandal besar, seperti yang terjadi di perusahaan Jiwasraya, Asabri, Garuda

Indonesia, Pertamina, serta pelanggaran-pelanggaran lain dalam proses pengadaan barang dan jasa di sejumlah perusahaan BUMN, memperlihatkan bahwa masalah integritas organisasi masih menjadi tantangan utama di lingkungan bisnis Indonesia. Ironisnya, pada masa kasus-kasus ini terungkap, penegakan hukum kerap tidak berjalan secara adil. Hukum diterapkan agar menindak dengan tegas dan adil. Namun pada kenyataannya, perlakuan hukum bisa berbeda-beda tergantung pelaku yang terlibat. Kejadian ini menimbulkan tanda tanya mengenai bagaimana kualitas tata kelola perusahaan, khususnya BUMN yang sering menjadi pusat perhatian skandal korupsi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat berdampak negatif pada perekonomian negara serta citra baik perusahaan. (Dhi'fa, 2025)

Kejadian-kejadian tersebut menjadi dasar kuat pentingnya memahami dan menganalisis konsep etika bisnis serta Good Corporate Governance (GCG). Pada dasarnya, dokumen mengenai etika dan panduan tata kelola dimiliki oleh semua perusahaan, akan tetapi, banyak yang menganggap dokumen-dokumen tersebut hanya sebagai formalitas administrasi saja. Padahal, integritas perusahaan tidak hanya dilihat dari keberadaan dokumen-dokumen tersebut, melainkan dari bagaimana nilai-nilai etika benar-benar diimplementasi dan budaya organisasi diubah secara keseluruhan.

Etika bisnis pada dasarnya berperan dalam membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan antara perusahaan dengan pemangku kepentingannya. Perusahaan yang menjunjung etika akan meraih kepercayaan publik, citra positif, dan keberlanjutan jangka panjang. Di sisi lain, pelanggaran etika dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian besar, seperti yang terjadi pada kasus Jiwasraya dan Asabri yang berdampak terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami apakah etika bisnis hanyalah konsep moral yang normatif, atau justru elemen krusial yang dapat mempengaruhi seberapa efektif penerapan Good Corporate Governance (GCG). Selain itu, studi ini juga menjelaskan secara detail dan memberikan pandangan menyeluruh tentang etika bisnis, prinsip-prinsip GCG, dan bagaimana keterkaitan teoritis dan praktis antara etika bisnis dengan Good Corporate Governance (GCG).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendalami fenomena etika bisnis dan Good Corporate Governance (GCG) secara lebih mendalam, dengan mengandalkan analisis literatur, jurnal ilmiah, serta studi kasus yang relevan. Data penelitian dikumpulkan melalui pemeriksaan terhadap lima jurnal ilmiah yang khusus membahas studi kasus PT. Brantas Abipraya dan perusahaan manufaktur. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada berbagai dokumen penting, seperti pedoman GCG BUMN, kode etik perusahaan, laporan Good Corporate Governance (GCG) dari perusahaan BUMN, laporan keuangan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, serta peraturan pemerintah terkait tata kelola perusahaan.

Penelitian ini dianalisis dengan cara membandingkan isi dari berbagai dokumen seperti jurnal ilmiah dengan topik serupa dan meliputi proses reduksi data, pengelompokan data, penafsiran data, pengolahan informasi menjadi narasi yang utuh serta analisis statistik dengan menggunakan SPSS. Inti dari analisis ini adalah untuk menemukan keterkaitan teoritis dan praktis antara etika bisnis dengan Good Corporate Governance (GCG), serta bagaimana penerapannya berdampak pada integritas organisasi dan kinerja suatu perusahaan, apakah dengan adanya etika bisnis dan Good Corporate Governance (GCG) dapat menghasilkan proyek perusahaan yang lebih bermutu dan bermanfaat bagi banyak pihak atau malah sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perusahaan yang menerapkan konsep etika bisnis secara konsisten memiliki skor Good Corporate Governance (GCG) yang lebih baik. Dalam studi kasus PT Brantas Abipraya, penerapan kode etik dan peningkatan kualitas pengawasan internal mampu meningkatkan skor Good Corporate Governance (GCG) menjadi 85,51%. Data tersebut memperlihatkan bahwa adanya hubungan positif antara integritas manajemen dengan kualitas tata kelola perusahaan. Selain itu, hasil kajian juga memperlihatkan bahwa perusahaan manufaktur yang berperan sebagai objek penelitian mengalami peningkatan profitabilitas hingga 12% setelah meningkatkan penerapan GCG dan etika. Hal ini memperlihatkan bahwa etika tidak hanya berdampak terhadap moral, tetapi juga berdampak terhadap finansial secara signifikan. (Arif, Syaiful (Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2020)

Etika bisnis merupakan cabang dari etika terapan yang mempelajari tentang prinsip-prinsip moral, nilai, dan norma yang mengarahkan perilaku individu maupun organisasi dalam konteks bisnis. Etika bisnis bukan sekadar pedoman tertulis, tetapi juga mencakup secara keseluruhan cara perusahaan menghadapi masalah moral, pengambilan keputusan, dan cara menjalankan kegiatan operasional.

Untuk memahami etika bisnis secara lebih mendalam, perlu ditinjau berbagai perspektif filosofis. Dalam etika deontologis, tindakan dinilai yang berdasarkan kewajiban moral yang harus dilakukan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Dalam konteks bisnis, Perusahaan berkewajiban dalam penyampaian informasi secara jujur, tidak melakukan manipulasi, serta menghormati hak-hak konsumen dan karyawan. Etika utilitarianisme menegaskan bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, suatu organisasi dalam bertindak harus mengikuti cara-cara yang bermanfaat besar terhadap masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya minimal. Dalam konteks korporasi, keputusan bisnis seharusnya diarahkan untuk memberikan keuntungan terbesar bagi para pemegang saham, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Sementara itu, etika kebajikan menekankan perlunya pembentukan karakter moral, seperti kejujuran, disiplin, integritas, dan kebijaksanaan, sebagai fondasi perilaku etis dalam perusahaan. (HANDAYANI RIS, SH., 2021)

Dari perspektif manajerial, etika bisnis diartikan ke dalam norma operasional perusahaan. Kode etik (Code of Conduct) menjadi instrumen utama yang digunakan untuk mengkomunikasikan nilai moral perusahaan kepada seluruh karyawan dan mitra bisnis. Namun berbagai penelitian juga menegaskan bahwa keberadaan kode etik tidak menjamin perilaku etis apabila tidak didukung pengawasan, pelatihan, dan internalisasi nilai dalam budaya organisasi. Etika bisnis juga berhubungan erat dengan sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system. Perusahaan yang memiliki budaya etis akan memastikan sistem pelaporan berjalan independen, aman, dan bebas dari ancaman terhadap pelapor.

Dalam perspektif psikologis, perilaku tidak etis kebanyakan muncul karena tekanan target, budaya permisif, dan lemahnya sistem pengawasan. Berbagai penelitian juga menjelaskan fenomena moral disengagement, di mana individu membenarkan tindakan tidak etis sebagai bagian dari “kebiasaan organisasi”. Dalam konteks BUMN, beberapa pelanggaran terjadi karena menormalisasikan perilaku curang, seperti mark-up biaya proyek, gratifikasi, dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, internalisasi nilai etika menjadi tugas yang sangat penting bagi Perusahaan agar perilaku etis tidak hanya muncul dari tekanan sistem perusahaan, tetapi juga dari kesadaran setiap individu. Nilai GCG PT

Brantas Abipraya: Komisaris 92,85%, Direksi 93,55% → masuk kategori “sangat baik”. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan dalam nilai GCG setelah meningkatkan kode etik dan sistem pelaporan internal. (Arif, Syaiful (Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2020)

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang terkait dan berkepentingan (stakeholder) dalam perusahaan. Pihak-pihak terkait dimaksud terdiri dari pihak internal yang mengelola perusahaan dan pihak eksternal yang meliputi pemegang saham, kreditur dan lain-lain. Tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan good corporate governance adalah untuk meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang serta menciptakan nilai tambah bagi pihak yang berkepentingan (stakeholders). (Dwiridotjahjono, 2010)

Selain teori agensi, GCG juga didukung oleh teori stakeholder yang menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada karyawan, konsumen, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Perusahaan yang mengabaikan kepentingan stakeholder cenderung menghadapi masalah legitimasi sosial. Teori stewardship menekankan pentingnya moralitas manajemen untuk menjaga aset perusahaan. Dalam teori ini, kepemimpinan etis sangat penting untuk mendorong organisasi untuk beroperasi dengan tanggung jawab.

Di Indonesia, prinsip GCG dirumuskan dalam pedoman TARIF: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness. Transparansi menuntut keterbukaan informasi yang akurat terhadap publik. Akuntabilitas mewajibkan adanya pembagian tugas yang jelas dan pengawasan melalui audit internal dan eksternal. Responsibilitas menekankan kepatuhan terhadap hukum, norma sosial, dan standar etika. Independensi memastikan bahwa perusahaan terbebas dari intervensi yang tidak sah, termasuk dari pihak politik, pemegang saham, maupun kelompok kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas keputusan. Fairness mewajibkan perusahaan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil. (Liestianingsih, 2023)

Kasus PT Brantas Abipraya menunjukkan bagaimana penerapan etika dan tata Kelola dapat meningkatkan skor GCG perusahaan menjadi 85,51% dan berdampak terhadap peningkatan laba hingga 15%. Fakta ini menekankan bahwa GCG bukan hanya instrumen kepatuhan, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan.

Hubungan antara etika bisnis dan GCG bersifat erat dan tidak dapat dipisahkan. Etika bisnis merupakan landasan moral yang menentukan bagaimana perusahaan harus beroperasi, sedangkan GCG menyediakan struktur dan mekanisme yang memastikan nilai-nilai etika tersebut dilaksanakan secara konsisten. Tanpa etika, tata kelola perusahaan tidak lebih dari prosedur yang tidak bermakna. Sebaliknya, tanpa GCG, etika hanya menjadi konsep normatif yang sulit diwujudkan secara praktik. (Akbar Zulfikar, Ibrohim Malik, 2025)

Etika bisnis memengaruhi tata kelola perusahaan melalui nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut menentukan kualitas keputusan manajemen. Manajer yang memiliki integritas tidak akan memanipulasi laporan, melakukan mark-up, atau menyembunyikan informasi dari pemegang saham. Etika memberikan arah moral bagi organisasi sehingga tindakan manajemen tidak hanya didasarkan pada perhitungan ekonomi, tetapi juga pertimbangan moral. Sementara itu, GCG menjadi alat untuk menegakkan nilai-nilai tersebut, seperti mekanisme audit, komite pengawas, whistleblowing system, dan pengawasan dewan komisaris.

Dalam konteks BUMN, penerapan etika dan GCG sering kali menghadapi tantangan

besar, seperti intervensi pihak luar, tekanan politik, dan budaya organisasi yang masih toleran terhadap perilaku tidak etis. Namun menurut Syaiful Arif (2020), kondisi menunjukkan bahwa ketika etika dan GCG diperkuat melalui pelatihan, pengawasan ketat, dan mekanisme penegakan hukum internal, perusahaan dapat memperbaiki kinerja dan reputasinya. (Syaiful Arif, 2020)

Dari perbaikan internal ini, maka diharapkan Perusahaan BUMN dapat meningkatkan penerapan dari tata kelola perusahaan, karena jika tata kelola dijalankan dengan baik maka akan meningkatkan kinerja perusahaan yang disertai kepercayaan dari pihak eksternal yang semakin meningkat. (Dwi et al., 2024)

Dengan demikian, hubungan antara etika dan GCG bersifat saling menguatkan. Etika memberikan orientasi normatif dan moral, sedangkan GCG memberikan struktur pengawasan. Ketika keduanya diterapkan secara bersama, Perusahaan dapat memperoleh dasar yang kuat untuk membangun citra positif, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan keberlanjutan organisasi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian konsisten dengan teori bahwa etika bisnis merupakan dasar penting dalam pembangunan tata kelola perusahaan yang baik. Nilai-nilai etika seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab menjadi pilar utama yang memengaruhi kualitas keputusan manajemen. Sebaliknya, GCG memberikan mekanisme yang memastikan bahwa perilaku etika dapat diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, etika dan GCG dapat membentuk hubungan simbiotik yang saling memperkuat satu dengan lainnya.

Etika bisnis dan Good Corporate Governance merupakan dua konsep yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Etika bisnis memberikan landasan moral bagi setiap individu dan organisasi, sedangkan GCG menyediakan kerangka formal yang memastikan nilai-nilai etika dapat diterapkan secara efektif. Penerapan keduanya terbukti meningkatkan efektivitas organisasi, memperkuat kepercayaan publik, dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Saran yang diberikan adalah agar perusahaan—khususnya BUMN—dapat memperkuat budaya etika melalui internalisasi nilai, pelatihan rutin, dan kepemimpinan etis. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan melakukan penilaian GCG secara lebih independen.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Zulfikar, Ibrohim Malik, I. I. (2025). Etika Bisnis Dan Good Corporate Governance: Sebuah Tinjauan Konseptual. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*.
- Arif, Syaiful (Universitas Mercu Buana, Jakarta, I. (2020). IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO). *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(5), 502–512. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Dhi'fa, S. H. (2025). BUMN Dalam Cengkeraman Korupsi, Gagalnya Tata Kelola dan Lemahnya Tindakan. *Genta Andalas*. <https://www.gentaandalas.com/baca/32538/bumn-dalam-cengkeraman-korupsi-gagalnya-tata-kelola-dan-lemahnya-tindakan/>
- Dwi, T., Aji, S., & Wulandari, I. (2024). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan BUMN dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Dwiridotjahjono, J. (2010). Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia. 5(2), 101–112.
- HANDAYANI RIS, SH., M. (2021). ETIKA DAN HUKUM BISNIS (A. Yasmin (ed.); 1st ed.). STIE IPWIJA JL. Letda Nasir No. Cikeas Nagrak (Cibubur), Gunung Putri Bogor Tel. 021-

8233737 Fax.021-8234224 www.stieipwija.ac.id.

- Humas. (2024). Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 dan Proyeksi Tantangan 2024. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/dinamika-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2023-dan-proyeksi-tantangan-2024/#:~:text=Secara kumulatif sepanjang 2023%2C realisasi,domestik yang terdampak inflasi tinggi.>
- Liestianingsih, H. A. (2023). 5 (Lima) Prinsip Good Governance dalam Pengurusan Piutang Negara. Kementerian Keuangan; Direktorat Jenderal Keamanan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>.